



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2021**

Sarilamak, Juli 2020

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2021.

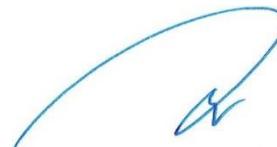
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2021.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Tahap ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, Juli 2020

**Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



**AFRIZAL, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Rentra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota	22
Tabel 2.3	Pemetaan Isu-isu Penting pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja	24
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	26
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021	40
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan pada Setiap OPD	43
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja	44
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian	44
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi	44
Tabel 3.6	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45
Tabel 4.1	Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan IKU OPD....	60
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Permendagri No.13 Tahun 2006)	61
Tabel 4.3	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Permendagri No.90 Tahun 2019)	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi umum Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini merupakan revisi RPJMD Tahun 2016-2021.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-

2021. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dimulai dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Oleh karena itu, menindaklanjuti amanat pasal 138-143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan Renja sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat

Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapelitbang untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan sebagainya;

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021;

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang berisi rencana kerja tahun 2021 beserta rencana pendanaannya;

Bab V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian Renstra Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

Tabel 2.1 :
(Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020		
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PERINDUSTRIAN										
XX	07	15									
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya IKM sehat									
	04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi	103 produk	28 Produk	75 IKM, 20 org, 5 sentra	55 IKM, 20 org, 5 sentra	73,3 %	53 org, 100 IKM, 15 halal dan 10 merk	28 produk, 155 IKM, 73 org, 5 sentra,	33,98 %
	05	Pengembangan Inovasi Sistem Teknologi Industri	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial	16 komoditi	5 Komoditi	70 orang, 4 angk	50 org, 3 angk	71,4 %	317 org	5 komoditi, 367 org	30 %
	06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah kelompok IKM yang difasilitasi dengan bantuan peralatan	35 kelompok	11 Kelompok	13 kelompok	13 kelompok	100 %	110 unit	24 kelompok, 110 unit	68,56 %
XX	07	16									
	Program Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya IKM sehat									

			01	Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terfasilitasinya IKM dalam pemanfaatan sumber daya	13 produk	5 Produk	2 IKM dan 2 sentra produksi	2 IKM dan 2 Sentra produksi	100 %	3 produk	8 produk, 2 IKM, 2 sentra	61,3 %
			02	Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih	300 org	150 Org	3 angkt / @30 org, 10 desain	3 angkt / @30 org,	100 %	359 org	559 org, 10 desain	186 %
			03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil menengah	Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri di Kab. Lima Puluh Kota menengah	1 dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	100 %
			05	Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM	Terfasilitasinya akses permodalan bagi IKM	37 IKM	0	60 IKM	2 angkt / @ 30 IKM	100 %	60 org	120 org	324 %
			06	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta	32 IKM	0	60 org, 1 kali temu bisnis	60 Org, 1 kali temu bisnis	100 %	155 org	215 org, 1 kali temu bisnis	671 %
XX	07	18		Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya pertumbuhan IKM								
			03	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir	Fasilitasi pameran dan kegiatan Dekranasda	36 even	6 even	5 event	5 even	100 %	6 even	17 even	58,3 %
			02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah bantuan alat produksi	4 even, 36 unit	4 Even, 2 unit	10 paket	10 paket (50 unit)	100 %	4 Paket (25 unit)	4 even, 2 unit, 14 paket	219 %
XX	07	19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Meningkatnya IKM sehat								
			02	Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana di sentra IKM	5 paket	2 Paket	2 sentra, 2 paket	2 sentra, 1 paket	50 %	1 paket	4 paket, 2 sentra	80 %
1	01	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran								
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %

			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan & kelengkapan surat-surat kendaraan dinas	96 unit	36 unit	19 unit	19 unit	100 %	20 unit	75 unit	78,1 %
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarkannya honor PA, KPA Bendahara, PPTK , dll	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
			10	Belanja Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
			11	Belanja Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 unit, 1 paket	1 unit kulkas	-	-	-	1 paket	1 unit, 1 paket	100 %
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media	15 eksemplar	6 eksemplar	3 eksemplar	3 eksemplar	100 %	3 eksemplar	12 eksemplar	80 %
			17	Belanja makan minum tamu dan rapat	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai	60 bln	24 bln	2880 porsi makan, 3310 porsi minum	2880 porsi makan, 3310 porsi minum	100 %	12 bln	36 bln, 2880 porsi makan, 3310 porsi minum	80 %
			18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1	01	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								

		03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran yang kondusif	3 paket	1 paket	0	0	0	1 paket	2 paket	66,67 %
		05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak	3 unit	0	0	0	0	1 unit roda 4	1 unit roda 4	30,33 %
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	6 paket	120 %
		09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	5 paket	100 %
		10	Pengadaan meubeler	Tersedianya meubeler kantor	2 paket	1 paket	0	0	0	0	1 paket	50 %
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 paket	2 paket	0	0	0	1 paket	3 paket	60 %
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan pembelian BBM	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bulan	24 bulan	AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin Air, Meubeler, dll	AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin Air, Meubeler, dll	100 %	12 bulan	36 bulan, AC, Komputer, Laptop, Printer, TV, Mesin Air, Meubeler, dll	80 %
	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur								
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	95 stel	0	45 stel	45 stel	100 %	0	45 stel	47,36 %
		05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	50 stel	0	0	0	0	50 stel	50 stel	100 %
	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur								
		01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal	4 paket	2 paket	2 kali dlm prov, 2 kali luar prov	1 kali dlm prov, 3 kali luar prov	100 %	1 paket	3 paket, 1 kali dlm prov, 3 kali luar prov	80 %
		02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	175 org	50 org	2 angk / @ 40 org	2 angk / @ 40 org	100 %	0	130 org	74,28 %

		03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya bimtek peningkatan SDM	2 paket	1 paket	0	0	0	50 org	1 paket, 50 org	50 %
	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentasi perkembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
		01	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	36 dokumen	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	100 %	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	RKA/DPA, RKAP/DPAP, LKjIP, LKPJ, PK, Laporan Tahunan	80 %
		04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	100 %	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	80 %
			TENAGA KERJA									
1	02	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja								
		01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya penyusunan buku survey angkatan kerja tahun 2017	50 buku	50 Buku	0	0	0	0	50 buku	100 %
		03	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	Tersedianya BLK	1 paket	-	0	-	0	0	0	0
		06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	495 org	124 org	236 org, 7 paket	164 org, 5 paket	69,5 %	232 org, 6 paket	416 org, 11 paket	84,04 %
		10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	1060 org	480 org	80 org	80 org	100 %	250 org	810 org	76,41 %
1	02	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja								

		02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, sosialisasi, PBJ terhadap pencari kerja dan pelayanan pembuatan Kartu AK 1, penempatan tenaga kerja, Job Fair	14000 org	4000 org	24 kali, 2000 org, 40 perusahaan, 6 kasus, 10 perusahaan, 6 sengketa, 10 kasus, 10 perusahaan	24 kali, 2000 org, 40 perusahaan, 6 kasus, 10 perusahaan, 6 sengketa, 10 kasus, 10 perusahaan	100 %	2200 org	10200 org, 24 kali, 40 perusahaan, 6 kasus, 10 perusahaan, 6 sengketa, 10 kasus, 10 perusahaan	72,85 %
		03	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna bagi angkatan kerja	80 org	80 org	0	0	0	0	80 org	100 %
		05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pengembangan kelembagaan, produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	240 org	66 org	2 angkt / @ 20 org	2 angkt / @ 20 org	100 %	80 org	186 org	77,5 %
		06	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Tersedianya data pencari kerja, penyempurnaan dan penambahan buku PTKD	50 buku	50 buku	0	0	0	0	50 buku	100 %
		07	Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya upaya fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	40 orang	40 orang	0	0	0	0	40 orang	100 %
1	02	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan								
		17	04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Adanya pemahaman yang baik dari angkatan kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan	120 org	126 Org	80 org	80 org	0	0	206 org	171,67 %

		17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum terhadap keselamatan Kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di perusahaan, kegiatan LKS Tripartit, Dewan Pengupahan	145 perusahaan	75 perusahaan	30 perusahaan	0	0	40 perusahaan, 6 kasus, 6 perusahaan	115 perusahaan, 6 kasus, 6 perusahaan	79,3 %
				TRANSMIGRASI									
XX	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi								
		15	01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi Kapur IX	5 paket	2 Paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %
		15	02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	5 paket	2 Paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	4 paket	80 %
		15	03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya pembuatan dokumen perencanaan kawasan transmigrasi (RKT) yang komprehensif untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Galugur	2 paket	2 Paket	0	0	0	0	2 paket	100 %

Sesuai Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada urusan Industri, terdapat 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang mendukung indikator kinerja tercapainya peningkatan IKM sehat dan pertumbuhan IKM. Pencapaian indikator kinerja peningkatan IKM sehat sampai dengan tahun 2019, belum tercapai sesuai dengan target sebesar 56,14% (296 IKM), baru tercapai sebesar 36,63% (188 IKM). Sedangkan pencapaian indikator kinerja pertumbuhan IKM sampai dengan tahun 2019 telah melebihi target sebesar 49,04% (51 IKM), telah tercapai sebesar 159,61% (166 IKM). Salah satu kendala belum tercapainya peningkatan IKM sehat disebabkan oleh belum fokusnya OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap IKM yang akan disehatkan. Selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perdagkop dan UKM, DPMPTSP, Dinkes, dll. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM belum dilakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM, padahal banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk disehatkan. Untuk pencapaian indikator kinerja pertumbuhan IKM sampai saat ini telah tercapai melebihi target, salah satunya dikarenakan peluang berusaha bagus. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung untuk berusaha.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, kegiatan pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 33,98% dari target 70,87%
- Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, kegiatan pengembangan inovasi sistem teknologi industri, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 30% dari target 75%

- Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 68,56% dari target 68,57%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 61,3% dari target 76,92%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 186% dari target 80%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 324% dari target 59,46%
 - Program pengembangan IKM, kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 671% dari target 53,13%
 - Program penataan struktur industri, kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri, prakiraan realisasi capaian dengan tahun 2020 sebesar 219% dari target 61,11%
 - Program penataan struktur industri, kegiatan pembinaan keterkaitan produksi industri hingga hilir, prakiraan realisasi capaian dengan tahun 2020 sebesar 58,3% dari target 55,55%
 - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, kegiatan peyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat, prakiraan realisasi capaian dengan tahun 2020 sebesar 80% dari target 80%
2. Pada urusan tenaga kerja, terdapat 3 (tiga) program dan 10 (sebelas) kegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya kualitas angkatan kerja, meningkatnya penempatan tenaga kerja dan meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan.

- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan penyusunan data base tenaga kerja daerah, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan pembangunan balai latihan kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 0% dari target 0%
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 84,04% dari target 70,3%
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 76,41% dari target 76,41%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 72,85% dari target 78,85%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 77,5% dari target 66,67%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program peningkatan kesempatan kerja, kegiatan fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 171,67% dari target sebesar 100%

- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 79,3% dari target sebesar 79,3%
3. Pada urusan transmigrasi, terdapat 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi.
- Program pengembangan wilayah transmigrasi, kegiatan penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 80% dari target sebesar 80%
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi, kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 80% dari target sebesar 80%
 - Program pengembangan wilayah transmigrasi, kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana social dan ekonomi di kawasan transmigrasi, prakiraan realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dari target sebesar 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pelayanan urusan industri, ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan antara lain : Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, dan Permenakertrans nomor per.07/Men/IV/2008 tentang penempatan tenaga.

Sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup berkembang, terutama industri kecil menengah (IKM). IKM tersebar di kawasan pemukiman penduduk, seperti industri kecil pengolahan makanan, industri kerajinan dan sandang, serta aneka industri lainnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2019 adalah sebesar 87 unit atau berjumlah 7267 unit. Dalam rangka mengembangkan IKM fashion, pada

tahun 2019 telah diberikan bantuan mesin bordir dan mesin jahit, dilaksanakan pelatihan desain tenun dan bordir, pelatihan kombinasi tenun dan sulam, dan lomba desain baju muslim. Selain itu dalam rangka pengembangan industri fashion, terutama IKM tenun telah dilaksanakan peninjauan sumber bahan baku benang ke Bandung. Karena permasalahan yang selama ini sering dikeluhkan pengerajin tenun adalah ketergantungan bahan baku benang dari daerah lain, menyebabkan harga bahan baku benang mahal. Hal ini karena IKM belum mengetahui tempat/sumber bahan baku diperoleh.

Dalam rangka kelengkapan sarana dan prasarana industri kecil menengah sentra industri gula aren / gula semut di Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan rumah produksi gula semut dan dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang serta peralatan produksi gula semut dan minuman nira siap saji, bersumberkan dana DAK Kementerian Perindustrian RI. Kemudian dilanjutkan tahun 2019 telah diadakan sarana produksi gula semut, dan peralatan kemasan gula semut dan kemasan minuman nira siap saji. Untuk saat ini, belum berproduksi karena masih dalam rangka lanjutan pembangunan.

Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan untuk pelayanan pendaftaran pencari kerja selama tahun 2019 terdapat 1.901 pencari kerja yang diterbitkan AK.1 nya. Dalam rangka meningkatkan produktifitas pencari kerja dilaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja. Pencari kerja yang diberi pelatihan keterampilan kerja sebanyak 252 orang angkatan kerja. Jenis pelatihan yang diikuti berupa pelatihan komputer, teknisi sepeda motor, pelatihan menjahit, pelatihan elektronika, pelatihan kesekretarisan, administrasi perkantoran, marketing, otomasi industri, teknisi hp, pelatihan calon polri bagi putra-putri daerah, dll. Selain melalui APBD pelatihan-pelatihan tersebut banyak pula dilaksanakan dengan anggaran APBN melalui BBPLK di seluruh Indonesia. Selain itu, pencari kerja yang telah ditempatkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 534 orang, yang ditempatkan di instansi pemerintah, swasta maupun mandiri. Pelayanan lainnya di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian informasi bursa kerja *on line*, pengawasan dan perlindungan perusahaan dan tenaga kerja.

Pada halaman berikut ini disajikan Tabel 2.2 (Tabel T-C.30 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Tabel 2.2 :
(Tabel T.C-30 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			PROYEKSI		CAT ANAL
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Industri Kecil Menengah Sehat (%)	-	-	18,13	17,54	20,47	22,03	21,83	4,87	8,57	23,19	21,9	21,2	-
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	-	-	14,42	31,73	49,04	74,04	100,00	38,46	58,65	62,5	73,7	100	-
3	Persentase Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja (%)	-	-	7,60	14,90	18,63	29,43	29,43	29,95	19,30	18,78	28,9	28,8	-
4	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja (%)	-	-	6,03	19,78	23,08	24,73	26,38	12,07	19,19	17,61	24,1	25,9	-

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, untuk indikator persentase industri kecil menengah sehat pencapaian tahun 2017 s/d 2019 sebesar 36,76% sementara target sebesar 56,14%. Sampai akhir periode RPJMD tahun 2021 ditargetkan IKM sehat sebesar 100% atau 513 IKM sehat. Yang dimaksud IKM sehat adalah : 1) memiliki aspek perizinan legalitas usaha lengkap; 2) memiliki tata kelola (manajemen) baik; 3) memiliki bisnis/kemampuan menghasilkan produk mengalami peningkatan. Aspek perizinan legalitas usaha yang minimal harus dimiliki adalah IUI, PIRT (untuk IKM olahan makanan), Halal dan Merek. IKM yang memiliki tata kelola (manajemen) baik adalah tata kelola IKM yang orientasi bisnis, serta kemampuan produksi meningkat sesuai dengan permintaan pasar. Pencapaian indikator IKM sehat masih jauh tertinggal dari target yang ditetapkan. Salah satu kendala belum tercapainya peningkatan IKM sehat disebabkan oleh belum fokusnya OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap IKM yang akan disehatkan. Selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Perdagkop dan UKM, DPMPTSP, Dinkes, dll. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM belum melakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM, padahal

banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk disehatkan.

Untuk pencapaian indikator kinerja pertumbuhan IKM dari tahun 2017 s/d 2019 tercapai sebesar 159,61% (166 IKM) telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 49,04% (51 IKM). Tidak ditemui kendala yang berarti dalam rangka pembinaan penumbuhan IKM, karena peluang berusaha di Kabupaten Lima Puluh Kota bagus. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung untuk berusaha.

Pada urusan tenaga kerja pencapaian kinerja pelayanan peningkatan kualitas angkatan kerja, dari tahun 2017 s/d 2019 tercapai sebesar 68,03% dari target yang ditetapkan sebesar 34,13%. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan dibidangnya masing-masing dibutuhkan persiapan untuk mencetak tenaga kerja yang handal, dimulai dari pendidikan dan pelatihan secara formal dan informal. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja diharapkan tercipta tenaga kerja yang berkompeten, mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja. Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, telah intensif dilakukan pelatihan-pelatihan baik bersumberkan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Karena terbatasnya dana di daerah, maka Pemerintah Daerah telah melakukan MOU dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Indonesia, antara lain : BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Medan, BBPLK Bekasi, dan BBPLK Serang Banten. Telah banyak pencari kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengikuti pelatihan dan pendidikan keterampilan kerja di 5 BBPLK diatas.

Sedangkan untuk kinerja pelayanan peningkatan penempatan tenaga kerja pencapaian dari tahun 2017 s/d 2019 adalah sebesar 48,87% dari target yang ditetapkan sebesar 48,89%. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu upaya pencapaian target kinerja pelayanan. Selain penempatan melalui diatas, tenaga kerja yang bekerja secara mandiri cukup banyak. Karena minat pencari kerja berwirausaha cukup baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu-isu penting dimaksud mencakup sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Pemetaan Isu-Isu Penting pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya daya saing produk industri kecil menengah (IKM)	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah (IKM) sesuai potensi daerah	Penguasaan teknologi masih rendah Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri kecil menengah (IKM)
2.	Rendahnya kualitas keterampilan angkatan kerja	Kurangnya sarana tempat pelatihan keterampilan pencari kerja yang dipersyaratkan	Tidak sebandingnya jumlah pencari kerja yang perlu dilatih dengan jumlah pelatihan keterampilan pencari kerja yang akan dilaksanakan
3.	Rendahnya kesempatan kerja	Kurangnya lowongan kerja	Tidak sebandingnya angka pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Kurangnya kerjasama perusahaan industri dengan balai latihan kerja milik pemerintah / swasta tentang keterampilan / skill tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan industri tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil alasan kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.4 (Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut.

Tabel 2.4 :
(Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP OPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP OPD				
I.1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran				Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran	Din Perind. Naker	12 bulan	5,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran	Din Perind. Naker	12 bulan	5,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	s.d.a	12 bulan	65,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	s.d.a	12 bulan	65,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan & kelengkapan surat-surat kendaraan dinas	s.d.a	5 roda 2, 4 roda 4	11,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan & kelengkapan surat-surat kendaraan dinas	s.d.a	roda 2, 4 roda 4	11,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarkannya honor PA, KPA Bendh, PPTK , dll	s.d.a	12 bulan	280,000,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarkannya honor PA, KPA, PPK-SKPD, Bendahara, PPTK, PHL, dll	s.d.a	12 bulan	280,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor	s.d.a	12 bulan	70,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor	s.d.a	12 bulan	70,000,000
6	Belanja Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	s.d.a	12 bulan	69,000,000	Belanja Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	s.d.a	12 bulan	69,000,000
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	s.d.a	12 bulan	78,000,000	Belanja Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	s.d.a	12 bulan	78,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)	s.d.a	12 bulan	14,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)	s.d.a	12 bulan	14,000,000

9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	s.d.a		0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	s.d.a		0
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)	s.d.a	3 eks	7,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)	s.d.a	12 bulan	7,000,000
11	Belanja makan minum tamu dan rapat	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai	s.d.a	12 bulan	75,000,000	Belanja makan minum tamu dan rapat	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai	s.d.a	720 porsi makan, 745	75,000,000
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	s.d.a	12 bulan	300,000,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	s.d.a	12 bulan	300,000,000
1.2	Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana aparatur				Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana aparatur			
1	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan tempat parkir dan halaman kantor (lanjutan)	Din Perind. Naker	1 paket	300,000,000	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan tempat parkir dan halaman kantor (lanjutan)	Din Perind. Naker	1 paket	300,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	s.d.a	2 roda 2	40,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	s.d.a	2 roda 2	40,000,000
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	s.d.a	1 paket	30,000,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	s.d.a	1 paket	30,000,000
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	s.d.a	1 paket	55,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	s.d.a	1 paket	55,000,000
	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor	s.d.a	1 paket	100,000,000	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor	s.d.a	1 paket	100,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	s.d.a	1 paket	50,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	s.d.a	1 paket	50,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pembelian BBM	s.d.a	12 bulan	130,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pembelian BBM	s.d.a	12 bulan	130,000,000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	s.d.a	12 bulan	14,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	s.d.a	12 bulan	14,000,000
1.3	Program : Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur				Program : Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur			
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	s.d.a	50 stel	30,000,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	s.d.a	50 stel	30,000,000
1.4	Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur				Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	s.d.a	1 paket	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	s.d.a	1 paket	50,000,000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an	s.d.a	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an	s.d.a	0	0

I.5	Program :Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Per sentasi perkembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Program :Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Per sentasi perkembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	s.d.a	8 dokumen	30,000,000	Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja	s.d.a	8 dokumen	30,000,000
2	Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	s.d.a	1 dokumen	10,000,000	Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	s.d.a	1 dokumen	10,000,000
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
II.	TENAGA KERJA					TENAGA KERJA				
II.1	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja				Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
1	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Tersedianya BLK	s.d.a	1 paket	1,000,000,000	Pembangunan Blaaik Latihan Kerja	Tersedianya BLK	s.d.a	1 paket	1,000,000,000
2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan bagi angkatan kerja	Kab. LPK	144 org	1,050,000,000	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan bagi angkatan kerja jurusan menjahit, las, perbengkelan, sepeda motor, dan komputer	Kab. LPK	144 orang 6 paket	1,050,000,000 610,000,000
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan pemantauan terhadap pencari kerja yang akan dan yang sudah diberikan pelatihan	Kab. LPK	250 orang	50,000,000	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan pemantauan terhadap pencari kerja yang akan dan yang sudah diberikan pelatihan	Kab. LPK	250 orang	50,000,000
II.2	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja				Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja			

1	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Adanya informasi yang baik dari angkatan kerja terhadap dunia kerja dan ketersediaan lapangan kerja sesuai minat dan kemampuan (informasi bursa tenaga kerja), terlaksananya pelayanan AK1, dan job fair	s.d.a	2200 orang, 1 kali	300,000,000	Kegiatan : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Adanya informasi yang baik dari angkatan kerja terhadap dunia kerja dan ketersediaan lapangan kerja sesuai minat dan kemampuan (informasi bursa tenaga kerja), terlaksananya pelayanan AK1, dan terlaksananya job	Kab. Lima Puluh Kota	2200 orang, 1 kali	300,000,000
2	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya peluang usaha bagi kelompok usaha di nagari	Kab. LPK	80 orang	100,000,000	Kegiatan : Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya peluang usaha bagi kelompok usaha di nagari	Kab. LPK	80 org	100,000,000
II.3	Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan				Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan			
1	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya pelaksanaan norma kerja dan keselamatan kerja (k3) di perusahaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan, pengawasan TKA	s.d.a	40 perusahaan, 6 kasus, 6 perusahaan	200,000,000	Kegiatan : Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya pelaksanaan norma kerja dan keselamatan kerja (k3) di perusahaan dan terlaksananya pendataan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan, pengawasan TKA	Kab. Lima Puluh Kota	40 perusahaan, 6 kasus, 6 perusahaan	200,000,000
III.	PERINDUSTRIAN					PERINDUSTRIAN				
III.1	Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM melalui peningkatan IPTEK				Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM melalui peningkatan IPTEK			
1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan usaha			135,000,000	Kegiatan : Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan usaha			135,000,000
	a. Pengawasan dan monitoring IKM	Terlaksananya pengawasan dan monitoring IKM	Kab. LPK	100 IKM		a. Pengawasan dan monitoring IKM	Terlaksananya pengawasan dan monitoring IKM	Kab. LPK	100 IKM	
	b. Sosialisasi penggunaan bahan tambahan untuk makanan	Terlaksananya sosialisasi penggunaan bahan tambahan untuk makanan	s.d.a	1 angk, 30 org		b. Sosialisasi penggunaan bahan tambahan untuk makanan	Terlaksananya sosialisasi penggunaan bahan tambahan untuk makanan	s.d.a	1 angk, 30 org	
	c. Sosialisasi Halal	Terlaksananya sosialisasi halal	s.d.a	1 angkt, 30 org		c. Sosialisasi Halal	Terlaksananya sosialisasi halal	s.d.a	1 angkt, 30 org	

	e. Pembuatan profil pengembangan sentra IKM	Terlaksananya pembuatan profil pengembangan sentra IKM	s.d.a	5 sentra		e. Pembuatan profil pengembangan sentra IKM	Terlaksananya pembuatan profil pengembangan sentra IKM	s.d.a	5 sentra	
	f. Sosialisasi HKI/Merek IKM	Terlaksananya sosialisasi HKI/Merek IKM	s.d.a	25 orang		f. Sosialisasi HKI/Merek IKM	Terlaksananya sosialisasi HKI/Merek IKM	s.d.a	25 orang	
2	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya lomba desain tenun, pelatihan kerajinan, teknologi baru dalam pengembangan makanan olahan singkong, sosialisasi inovasi teknologi pengolahan jeruk, pelatihan kerajinan bambu	s.d.a	1 paket	250,000,000	Kegiatan : Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Terlaksananya lomba desain tenun, pelatihan kerajinan, teknologi baru dalam pengembangan makanan olahan singkong, sosialisasi inovasi teknologi pengolahan jeruk, pelatihan kerajinan bambu	s.d.a	1 paket	250,000,000
3	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terlaksananya bantuan mesin jahit, bantuan tenun, bantuan alat pengolahan kayu, bantuan alat IKM, bantuan alat penggiling bambu	s.d.a	11 kelompok	600,000,000	Kegiatan : Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terlaksananya bantuan mesin jahit, bantuan tenun, bantuan alat pengolahan kayu, bantuan alat IKM, bantuan alat penggiling bambu	s.d.a	1 paket	600,000,000
III.2	Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya daya saing produk IKM				Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya daya saing produk IKM			

1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya pelatihan kombinasi tenun halaban, pelatihan pengolahan hasil hutan non kayu, pelatihan diversifikasi produk olahan gambir, terfasilitasinya program dan kegiatan pusat/provinsi	s.d.a	60 org	280,000,000	Kegiatan : Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster	Terlaksananya pelatihan kombinasi tenun halaban, pelatihan pengolahan hasil hutan non kayu, pelatihan diversifikasi produk olahan gambir, terfasilitasinya program dan kegiatan pusat/provinsi	s.d.a	60 org	280,000,000
2	Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya fasilitasi kemudahan mendapatkan bahan baku bagi IKM tenun dan songket	s.d.a	3 produk	75,000,000	Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya fasilitasi kemudahan mendapatkan bahan baku bagi IKM tenun dan songket	s.d.a	3 produk	75,000,000
3	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM	Terlaksananya temu mitra dengan perbankan/bpk angkat	s.d.a	15 IKM	55,000,000	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM	Terlaksananya temu mitra dengan perbankan/bpk angkat	s.d.a	15 IKM	55,000,000

4	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya fasilitasi kemitraan dengan swasta, terlaksananya fasilitas temu bisnis	s.d.a	15 IKM	100,000,000	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya fasilitasi kemitraan dengan swasta, terlaksananya fasilitas temu bisnis	s.d.a	15 IKM	100,000,000
III.3	Program : Penataan Struktur Industri	Meningkatnya dan berkembangnya IKM				Program : Penataan Struktur Industri	Meningkatnya dan berkembangnya			
1	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terlaksananya pameran dalam/luar daerah	s.d.a	10 even	650,000,000	Kegiatan : Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terlaksananya pameran dalam/luar daerah	s.d.a	10 even	650,000,000
2	Penyediaan Sarana maupun Prasarana klaster industri	Terlaksananya bantuan peralatan usaha makanan ringan bagi IKM	s.d.a	14 unit	200,000,000	Penyediaan Sarana maupun Prasarana klaster industri	Terlaksananya bantuan peralatan usaha makanan ringan bagi IKM	s.d.a	14 unit	200,000,000
III.4	Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Meningkatnya pengembangan sentra industri potensial				Program : Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Meningkatnya pengembangan sentra industri potensial			
1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya data IKM yang akurat untuk pengembangan IKM, terlaksananya pengadaan peralatan produksi gula semut, dan lanjutan pembangunan sarana produksi gula semut dan terlaksananya monitoring izin industri	s.d.a	1 paket	3,200,000,000	Kegiatan : Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya data IKM yang akurat untuk pengembangan IKM, terlaksananya pengadaan peralatan produksi gula semut, dan lanjutan pembangunan sarana produksi gula semut dan terlaksananya	s.d.a	1 paket	3,200,000,000

IV.	TRANSMIGRASI					TRANSMIGRASI					
IV.1	Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi				Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi				
1	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi Kapur IX	Kec. Kapur IX	1 paket	30,000,000	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi Kapur IX	Kec. Kapur IX	1 paket	30,000,000	
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dlm rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kec. Kapur IX	1 paket	40,000,000	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dlm rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kec. Kapur IX	1 paket	40,000,000	
J U M L A H					8,822,000,000	J U M L A H					8,822,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2021, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2020, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *e-planning*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2021. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang* 2021, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2021.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2021. Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2021;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;

3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan
4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Adapun program / kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) *e-planning* yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

Tabel 2.5
Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Meningkatnya IKM sehat		
I.1	Kegiatan : Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas		Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi		
	Kegiatan : Sosialisasi bahan tambahan makanan (pengawet,pewarna,perasa dan pengembang)	Nagari muara paiti,kpr IX		20 orang	
I.2	Kegiatan : Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi		Jumlah kelompok IKM yang difasilitasi dengan bantuan peralatan		
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelompok Anyaman Mansiang SEJAHTERA	Jrg Taratak Nagari Kubang		2 unit	
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelompok Anyaman Mansiang BERKAH	Jrg Taratak Nagari Kubang		2 Unit	
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelompok Anyaman Mansiang TABUAN JAYA	Jrg Taratak Nagari Kubang		2 Unit	
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelompok Anyaman Mansiang MAJU JAYA	Jrg Taratak Nagari Kubang		2 Unit	
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelompok Anyaman Mansiang MEKAR	Jrg Taratak Nagari Kubang		2 Unit	
	Bantuan Peralatan Usaha Untuk Kelompok Usaha Produksi Makanan Olahan Kelompok HIKMAH	Jrg Koto Baru Nagari Kubang		1 Paket	
	Bantuan Mesin Jahit Untuk Kelompok Menjahit MAJU BERSAMA	Jrg Kubang Nagari Kubang		12 Unit	
	Bantuan Peralatan Mesin Jahit Lurus untuk IKM Fashion Kelompok MAJU	Nagari Maanggilang Koto Alam		20 Unit	
	Pengadaan mesin peras kelapa untuk UKM	Jorong datar nagari koto tengah		1 unit	
	Bantuan Peralatan Mesin Bordir untuk IKM Fashion	Kec. Lareh Sago Halaban,Kec. Luak dan Kec. Situjuh Limo Nagari		20 unit	
	Bantuan Peralatan Mesin Obras untuk IKM Fashion	Kec.LarehSago Halabandan Kec. Situjuh Limo Nagari		20 unit	
	Bantuan peralatan mesin bordir untuk IKM fashion	Kec. Mungka dan Guguak		20 unit	
	Bantuan Peralatan Mesin Jahit Lurus	Kecamatan Mungka, Guguak dan Akabiluru		30 Unit	

	Bantuan peralatan mesin jahit lurus	Kecamatan kpr IX dan Pangkalan		5 unit	
	Bantuan peralatan mesin jahit singer	Kecamatan kpr IX dan Pangkalan		20 unit	
I.3	Kegiatan : Pengembangan sistem inovasi teknologi industri		Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		
	Bimtek pengolahan bahan pewarna tekstil/batik dari limbah gambir	Kec. Mungka		20 orang	
	Bimtek pengolahan bahan pewarna tekstil/batik dari limbah gambir	Nagari muara paiti, kpr IX		20 orang	
II	Program : Pengembangan Industri Kecil Menengah		Meningkatnya IKM sehat		
II.1	Kegiatan : Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri		Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih		
	Pelatihan produk furniture dari bamboo	Kecamatan Bukit barisan Kec.Suliki dan Kec. Gunuang Omeh		20 orang	
II.2	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta		Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta		
	Fasilitasi mitra bisnis untuk IKM	Kec. Mungka dan Guguak		25 org	
III	Program : Penataan Struktur Industri		Meningkatnya pertumbuhan IKM		
III.1	Kegiatan : Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri		Jumlah bantuan alat produksi		
	Bantuan Peralatan Mesin Pengering Kerupuk	Nagari Pandam Gadang		1 Unit	
	Bantuan Mesin Ampia dan Pencetak Kerupuk Ubi	Nagari Pandam Gadang		5 unit	
	Bantuan Peralatan Mesin Bordir	Nagari Pandam Gadang		20 Unit	
IV	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Meningkatnya kualitas angkatan kerja		
IV.1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja		Telaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		
	Pelatihan Pra Pemagangan ke Jepang	Nagari Koto Lamo		10 Orang	
	Pelatihan Menjahit Kostum Bagi Pencari Kerja	Nagari Batu Balang		1 Paket	
	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Menjahit	Kecamatan Payakumbuh		30 Orang	
	Pelaksanaan Pelatihan Teknisi Handphone	Kecamatan Payakumbuh		16 Orang	
	Pelatihan Teknik Las Listrik bagi Pencari Kerja	Kec.Lareh Sago Halaban dan Kec. Situjuh Limo Nagari		50 orang	
	Pelatihan Teknisi Handphone bagi Pencari Kerja	Kec. Lareh Sago Halaban,Kec. Luak dan Kec. Situjuh Limo Nagari		60 orang	
	Pelatihan teknik las listrik bagi pencari kerja	Kec. Mungka dan Guguak		64 org	
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Kec. Mungka dan Guguak		64 org	
	Pelatihan teknisi Komputer bagi pencari kerja	Kec. Mungka dan Guguak		64 org	
	Pelatihan teknisi Handphone bagi pencari kerja	Kec. Mungka dan Guguak		64 org	
	Pelatihan pra pemagangan ke Jepang	Kec. Mungka dan Guguak		20 org	
	Pelatihan teknisi Komputer bagi pencari kerja	Kecamatan Bukit barisan		16 orang	
	Pelatihan tehnsisi komputer bagi pencari kerja	Kecamatan kpr IX dan Pangkalan		16 org	
	Pelatihan calon anggota Polri/TNI bagi putra putri daerah	Kecamatan kpr IX dan Pangkalan		25 orang	
V	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja		Meningkatnya penempatan tenaga kerja		

V.1	Kegiatan : Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		Terlaksananya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		
	Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari kerja Kecamatan Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh		30 orang	
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerjan	Kecamatan kpr IX dan Pangkalan		90 orang	
	Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari Kerja	Kec. Payakumbuh dan Harau		30 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain:

1. Pembangunan Ekonomi, diantaranya:
 - Makro Ekonomi
 - Ketahanan Pangan
 - Ketahanan Energi
 - Ketahanan Air
 - Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Politik
4. Penegakan Hukum
5. Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
6. Pertahanan dan Keamanan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, diantaranya:
 - Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - Pendidikan
 - Kesehatan
8. Pembangunan Kewilayahan
9. Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-*

job, pro-poor dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dengan mempedomani visi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai keinginan untuk mendukung visi tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 - 2021, yaitu :

Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman Dan Taqwa

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan visi diatas, maka perlu dirumuskan suatu misi yang dapat mendorong alokasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota merupakan penjabaran / turunan Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota *“Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah”*.

Dalam rangka mendukung misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

- a. *Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi*
- b. *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*
- c. *Program Penataan Struktur Industri*
- d. *Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial*
- e. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*
- f. *Peningkatan Kesempatan Kerja*
- g. *Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan*

h. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1	Meningkatnya daya saing produk daerah	1.1 Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat (%)	18.13	17.54	20.47	22.03	21.83
				1.2 Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	14.42	31.73	49.04	74.04	100.00
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	2.1 Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)	7.60	14.90	18.63	29.43	29.43
				2.2 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	6.03	19.78	23.08	24.73	26.38
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	SS 3	Meningkatnya nilai SAKIP	3.1 Hasil reviu Inspektorat (angka)	CC	BB	BB	BB	BB

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada urusan Perindustrian
 1. Belum optimal terolahnya potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
 2. Belum berkembangnya industri gambir yang merupakan produk unggulan daerah secara optimal
 3. Masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha (IKM) sehingga menyebabkan belum optimalnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
 4. Masih rendahnya peningkatan daya saing produk dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
 5. Masih kurangnya promosi serta peningkatan jaringan kerja sama pemasaran produk IKM
- b. Permasalahan pada urusan Tenaga Kerja
 1. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat karena banyak masyarakat yang bekerja disektor informal dibanding pada sektor formal
 2. Kurangnya keterampilan/skill masyarakat menyebabkan sulit mendapat peluang kerja
- c. Permasalahan pada urusan Transmigrasi
 1. Masalah hukum terhadap pekerjaan pembangunan transmigrasi di Koto Tangah Galugur Kecamatan Kapur IX tahun 2012/2013 yang lalu sampai saat ini belum ada kepastian. Hal ini karena adanya pemeriksaan unit Tipikor Polres Lima Puluh Kota terhadap adanya dugaan kelebihan pembayaran dan lain-lain dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan transmigrasi. Namun setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan, sampai dengan akhir tahun 2016 masih belum ada kejelasan hukum dari Polres Lima Puluh Kota akan

kelanjutan pemeriksaan tersebut. Hal ini mempengaruhi kelanjutan kegiatan pembangunan transmigrasi di Koto Tengah Galugur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kondisi jalan poros dari Jorong Koto Tengah Galugur ke lokasi transmigrasi ± 7,2 KM sangat tidak layak untuk ditempuh baik oleh kendaraan umum pengangkut barang maupun pengangkut orang. Hal ini disebabkan elevasi jalan yang sangat terjal, tikungan yang sulit, sempit dan terjal. Kondisi itu sulit diatasi karena medan yang terdiri dari bebatuan keras.

Berdasarkan permasalahan pada uraian di atas, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya kontribusi industri dan ketenagakerjaan dalam struktur perekonomian daerah
2. Meningkatnya kualitas produk industri rumah tangga dan IKM
3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan *holding company* pada pasar industri pengolahan
4. Meningkatnya tenaga kerja yang siap pakai dan profesional pada bursa pencari kerja
5. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas industri
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
3. Meningkatnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing dipasar bebas
4. Meningkatnya produksi produk kreatif
5. Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi daerah
6. Meningkatnya kemampuan tenaga kerja mandiri bagi wira usaha baru
7. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2016-2021. Selain itu, yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2021 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah*.

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2.
Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4. Penyediaan jasa administrasi keuangan5. Penyediaan jasa kebersihan kantor6. Penyediaan alat tulis kantor7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan10. Penyediaan makanan dan minuman11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan gedung kantor2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor4. Pengadaan peralatan gedung kantor5. Pengadaan meubeleu6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dan pelatihan formal2. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tabel 3.3.
Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembangunan Balai Latihan Kerja 2. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Tabel 3.4.
Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM	KEGIATAN
9.	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas 2. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 3. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
10.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri 3. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 4. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
11.	Penataan Struktur Industri	1. Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri 2. Pembinaan keterkaitan produksi hulu hingga ke hilir
12.	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Tabel 3.5
Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
13.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan 2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Berdasarkan empat pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 13 program dengan 42 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut rencana kerja dan pendanaan anggaran program dan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 secara lengkap kami uraikan pada bab 4.

Tabel 3.6
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2019)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai () Sesuai (=) Melampaui ()	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
I	INDUSTRI			
I.1	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat	Melampaui	-	Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja menyehatkan IKM 50 Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM
I.2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Melampaui	-	
II	TENAGA KERJA			
II.1	Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja	Melampaui	-	Telah dilakukan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja se Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas angkatan kerja dari Kabupaten Lima Puluh Kota
II.2	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	Belum tercapai	Masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja pada tahun 2019 sebagian besar telah melampaui target yang ditetapkan, baik pada urusan industri yang memiliki dua indikator kinerja IKM sehat dan persentase pertumbuhan industri. Hal ini disebabkan karena komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja. Untuk urusan tenaga kerja dengan indikator persentase peningkatan kualitas angkatan kerja telah melampaui target, sedangkan indikator persentase penempatan tenaga kerja, capaian kinerja tahun 2019 belum mencapai target. Dalam rangka peningkatan kualitas angkatan kerja, pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja di seluruh Indonesia (5 buah Balai Besar), dengan cara mengirimkan angkatan kerja untuk

dilatih dan dididik keterampilan untuk siap bersaing ke dunia kerja. Selain itu, dalam rangka penempatan tenaga kerja telah dilakukan kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk menempatkan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun jika dilihat capaian kinerja dari tahun 2017 s/d 2019 untuk empat poin indikator kinerja tersebut, masih ada yang belum mencapai target yaitu pada indikator persentase IKM sehat yang baru mencapai 36,63% yang seharusnya target 56,14%. Untuk mengejar ketertinggalan, maka pada tahun 2020 telah difokuskan anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase IKM sehat. Tapi, nampaknya juga akan terkendala dalam pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2020 ini dikarenakan terjadinya wabah Covid-19. Dimana adanya refocusing atau pemotongan anggaran program dan kegiatan yang selanjutnya diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Oleh karena itu, pada Renja 2021 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja. Kesempatan mencapai ketertinggalan indikator kinerja hanya pada tahun 2021, sebelum pergantian Kepala Daerah. Berikut ini adalah Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022. Matrik yang ditampilkan dalam 2 versi, yaitu berdasarkan nomenklatur lama (Permendagri No.13 Tahun 2006) dan nomenklatur baru (Permendagri No.90 Tahun 2019).

**Tabel 3.7. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		24.41%	808,312,564.20				1,100,000,000.00
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran		12 Bulan	6,000,000.00			12 Bulan	10,000,000.00
	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	6,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bulan	46,500,000.00			12 Bulan	70,000,000.00
	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	46,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		70,000,000.00
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan dan kelengkapan surat-surat dinas		20 Unit	7,500,000.00			25 Unit	10,000,000.00
	Tersedianya perizinan dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20 Unit	7,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor PA, KPA, Bendahara, PPTK dll		12 Bulan	290,000,000.00			12 Bulan	300,000,000.00
	Terbayarkannya honor PA, KPA, bendahara, PPTK, dll		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	290,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		300,000,000.00
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor		12 Bulan	80,000,000.00			12 Bulan	10,000,000.00
	Tersedianya bahan dan alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	80,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK		12 Bulan	60,000,000.00			12 Bulan	100,000,000.00
	Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	60,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		100,000,000.00
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor		12 Bulan	47,312,564.20			12 Bulan	100,000,000.00
	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	47,312,564.20	APBDKAB	RUTIN OPD		100,000,000.00
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik		12 Bulan	10,000,000.00			12 Bulan	20,000,000.00
	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		20,000,000.00
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3 media cetak	6,000,000.00			3 media cetak	10,000,000.00
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 Media Cetak	6,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai		12 Bulan	55,000,000.00			12 Bulan	70,000,000.00
	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	55,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		70,000,000.00
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertelaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	200,000,000.00			12 Bulan	400,000,000.00
	Tertelaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	200,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		400,000,000.00
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		20.75%	275,000,000.00				520,000,000.00
0.00.00.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran yang kondusif		1 Paket	50,000,000.00			1 paket	100,000,000.00
	Tersedianya gedung perkantoran yang kondusif		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	50,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		100,000,000.00
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak		2 unit roda 2	40,000,000.00			1 unit roda 4	100,000,000.00

	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2 Unit	40,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		100,000,000.00
0.00.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		1 Paket	20,000,000.00			1 paket	50,000,000.00
	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor		1 paket	25,000,000.00			1 Paket	50,000,000.00
	Tersedianya peralatan kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	25,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor		1 Paket	30,000,000.00			1 Paket	50,000,000.00
	Tersedianya mebeleur kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	30,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 Paket	20,000,000.00			1 Paket	50,000,000.00
	Terpeliharanya gedung kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pembelian BBM		12 Bulan	80,000,000.00			12 Bulan	100,000,000.00
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pembelian BBM		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	80,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		100,000,000.00
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		12 Bulan	10,000,000.00			12 Bulan	20,000,000.00
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		20,000,000.00
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		38.81%	25,000,000.00				40,000,000.00
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		50 stel	25,000,000.00			50 stel	40,000,000.00
	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 Stel	25,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		40,000,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur		23.48%	31,000,000.00				65,000,000.00
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal		1 Paket	25,000,000.00			1 paket	50,000,000.00
	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	25,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		50,000,000.00
0.00.00.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per UU an		50 orang	6,000,000.00			50 orang	15,000,000.00
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 Orang	6,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		15,000,000.00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentasi Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		31.38%	26,000,000.00				50,000,000.00
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja OPD		8 dokumen	20,000,000.00			8 dokumen	40,000,000.00
	Tersedianya laporan capaian kinerja OPD		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8 Dokumen	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		40,000,000.00
0.00.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	6,000,000.00			1 dokumen	10,000,000.00
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	6,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		10,000,000.00
1.02.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Angkatan Kerja		29.43%	560,000,000.00				1,009,000,000.00
1.02.01.15.02	Pembangunan balai latihan kerja	Tersedianya BLK		1 paket	128,400,000.00			1 paket	500,000,000.00
	Tersedianya BLK		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	128,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		500,000,000.00
1.02.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		144 orang	421,600,000.00			150 orang	459,000,000.00
	Pelatihan teknis sepeda motr bagi pencari kerja		Pauh Sangik	8 Orang	36,000,000.00		IKU OPD		5,000,000.00
	pelatihan komputer bagi anak putus sekolah		Nagari Tanjung Pauh	1 Orang	5,700,000.00		IKU OPD		6,000,000.00
	pelatihan menjahit dan bordir		Nagari Tanjung Pauh	1 Orang	4,800,000.00		IKU OPD		5,000,000.00
	Pelatihan Komputer & HP		Nagari	2 Orang	11,400,000.00		IKU OPD		12,000,000.00

	Pelatihan Menjahit		Jorong Menara Agung, Jorong Beringin Indah, Jorong Simpang Ganti, Jorong Koto Ramai, Jorong Koto Baru	2 Orang	9,600,000.00		IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan UKM dan Ekonomi Kreatif		Seluruh Jorong yang ada di kenagarian Solok Bio-Bio	1 Orang	4,800,000.00		IKU OPD		5,000,000.00
	Pelatihan Menjahit Kostum bagi Pencari Kerja		Nagari Mungka	1 Orang	4,800,000.00		IKU OPD		5,000,000.00
	Pelatihan Teknisi Komputer bagi pencari kerja		Nagari Mungka	1 Orang	5,700,000.00		IKU OPD		6,000,000.00
	Pelatihan Menjahit		Jorong Nagari Gadang	2 Orang	9,600,000.00		IKU OPD		10,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Pencari Kerja		Kantor Wali Nagari Andaleh	2 Orang	11,400,000.00		IKU OPD		20,000,000.00
	Pelatihan Menjahit		maek	2 Orang	9,600,000.00		IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan Teknik Komputer di Nagari Simpang Sugiran		Nagari Simpang Sugiran	2 Orang	11,400,000.00		IKU OPD		15,000,000.00
	Pelatihan dan pengadaan mesin jahit		nagari koto tengah	2 Orang	9,600,000.00		IKU OPD		10,000,000.00
	Meningkatnya Kualitas angkatan kerja jurusan menjahit		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Orang	4,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
	Meningkatnya kualitas angkatan kerja pra pemagangan ke jepang		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30 Orang	60,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		65,000,000.00
	Meningkatnya kualitas angkatan kerja untuk calon anggota TNI/Polri bagi putra/putri daerah		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8 Orang	16,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		20,000,000.00
	Pelatihan Pra Pemagangan ke Jepang		Nagari Koto Lamo	5 Orang	20,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		25,000,000.00
	Pelatihan tehniisi komputer bagi pencari kerja		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	2 Orang	11,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		15,000,000.00
	Pelatihan calon anggota Polri/TNI bagi putra putri daerah		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	8 Orang	16,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		20,000,000.00
	Pelatihan ilmu komputer, 2D,3D dan animasi pemuda Jorong Purwajaya		Nagari Sarilamak kec. Harau	2 Orang	11,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		15,000,000.00
	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Menjahit di Kecamatan Payakumbuh		Kecamatan Payakumbuh	2 Orang	9,600,000.00	APBDKAB	IKU OPD		5,000,000.00
	Pelatihan Pra Pemagangan Ke Jepang		Kecamatan Harau	5 Orang	20,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		25,000,000.00
	Pelatihan Menjahit Kostum Bagi Pencari Kerja		nagari batu balang	2 Paket	9,600,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan menjahit, teknis las listrik, teknisi sepeda motor, teknisi komputer, handphone, pra pemagangan ke Jepang Pemuda dan Pemuda dari Kecamatan Payakumbuh dan Harau		Kecamatan Payakumbuh dan Harau	5 Orang	20,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		25,000,000.00
	Pelatihan teknisi computer bagi pencari kerja		Kec. Bukik Barisan	2 Orang	11,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		15,000,000.00
	Permintaan pelatihan UMKM masyarakat Lubuak Batingkok Kecamatan Harau seperti, Menjahit dan usaha kue kering		Lubuak Batingkok	2 Orang	9,600,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan Teknisi Sepeda Motor bagi Pencari Kerja		Kec. Mungka, kec. Guguak	8 Orang	36,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		40,000,000.00
	Pelatihan Teknisi Komputer bagi Pencari Kerja		Kec. Mungka, kec. Guguak	2 Orang	11,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		15,000,000.00
	Pelatihan Pra Pemagangan ke Jepang		Kec. Mungka, kec. Guguak	5 Orang	20,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		25,000,000.00
1.02.01.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		250 orang	10,000,000.00			300 orang	50,000,000.00
	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 Orang	10,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		50,000,000.00
1.02.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		26.38%	80,000,000.00				175,000,000.00
1.02.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersebar luasnya informasi/ bursa tenaga kerja untuk angkatan kerja (sesuai minat dan kemampuan), sosialisasi PBJ terhadap pencari kerja, terlaksananya pelayanan AK1 dan terlaksananya job fair		2200 orang	40,000,000.00			2500 orang	100,000,000.00
	Adanya informasi yang baik dari angkatan kerja terhadap dunia kerja dan ketersediaan lapangan kerja sesuai minat dan kemampuan (informasi bursa tenaga kerja), pelayanan AK1 dan job fair		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	300 Orang	40,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		100,000,000.00
1.02.01.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		80 orang	40,000,000.00			100 orang	75,000,000.00
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja		Tanjung Bungo	1 Orang	4,800,000.00		IKU OPD		10,000,000.00

	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja		Suayan	1 Orang	4,800,000.00		IKU OPD		10,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		kampung Tangah	1 Orang	4,800,000.00		IKU OPD		10,000,000.00
	Terlaksananya Pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Orang	6,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	1 Orang	4,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		5,000,000.00
	Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari kerja di Kecamatan Payakumbuh		Kecamatan Payakumbuh	1 Orang	4,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja		Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh	1 Orang	4,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
	Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari Kerja Pelatihan untuk masyarakat di Kecamatan Payakumbuh dan Harau utusan masing masing Nagari		Kec. Payakumbuh dan Harau	1 Orang	4,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
1.02.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan dan Perkembangan Lembaga Ketenagakerjaan		26.38%	40,500,000.00				100,000,000.00
1.02.01.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatny pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum serta norma kerja dan keselamatan kerja (k3) di perusahaan dan terlaksananya pendataan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan serta terlaksananya LKS tripartit, dewan pengupahan, serta BPJS untuk THL		40 perusahaan	40,500,000.00			40 perusahaan	100,000,000.00
	Meningkatnya pelaksanaan norma kerja dan keselamatan kerja (k3) di perusahaan dan terlaksananya pendataan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan serta terlaksananya LKS Tripartit, Dewan pengupahan, serta BPJS untuk THL		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8 Perusahaan	40,500,000.00	APBDKAB	IKU OPD		100,000,000.00
2.00.07.15.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Peningkatan IKM Sehat		21.84%	400,000,000.00				587,000,000.00
2.00.07.15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi		30 produk	50,000,000.00			30 produk	95,000,000.00
	Pelatihan Teknologi		Nagari Koto	5 Orang	5,500,000.00		IKU Daerah		10,000,000.00
	Pengawetan Nira dan Minuman Cepat Saji		Tengah Simalanggang						
	Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5 Orang	5,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		10,000,000.00
	Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 Sertifikat	10,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
	Meningkatnya jumlah prduk yang berstandarisasi (halal dan merk)		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4 Merek	3,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		10,000,000.00
	Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak Provinsi dan Pusat terhadap peningkatan jumlah produk yang berstandarisasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		25,000,000.00
	Sosialisasi bahan tambahan makanan(pengawet,pewarna, perasa danpengembang		Nagari muara paiti,kpr IX	5 Orang	5,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		10,000,000.00
2.00.07.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		jeruk, aren,	150,000,000.00			jeruk, aren, singkong, gambir	240,000,000.00
	Pembinaan Kelompok pertanian		Nagari Pandam gadang	10 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		20,000,000.00
	Pengembangan usaha Petani Jeruk (Bimtek Pengolahan ninuman dalam kemasan dari jeruk		Jorong Menara Agung, Jorong Beringin Indah, Jorong Simpang Ganti, Jorong Koto Ramai, Jorong Koto Baru	10 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		20,000,000.00
	Bimtek Pengolahan Bahan Pewarna Tekstil/Batik dari Limbah Gambir		Muaro Paiti	10 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		20,000,000.00
	Pengembangan Produk Turunan Gambir		Nagari Talang Maur	15 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		20,000,000.00
	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15 Orang	17,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15 Orang	16,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00

	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15 Orang	17,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15 Orang	17,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
	Bimtek pengolahan bahan pewarna tekstil/batik dari limbah gambir		Nagari muara paiti, kpr IX	15 Orang	16,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		20,000,000.00
	Bimtek Pengolahan Bahan Pewarnatekstil/Batik dari Limbah Gambir		Kec. Mungka	15 Orang	16,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		20,000,000.00
2.00.07.15.06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah kelompok IKM yang difasilitasi dengan bantuan peralatan		11 kelompok	200,000,000.00			15 kelompok	252,000,000.00
	Bantuan Hibah Mesin untuk UMKM		Nagari Koto Tengah Simalanggang	7 Unit	35,000,000.00		IKU Daerah		
	Bantuan Mesin Ampia & Pencetak Kerupuk Ubi		Sungai Balantiak	2 Unit	30,000,000.00		IKU Daerah		
	Bantuan Hibah mesin Obras Merek Typical kelompok Jahit Melati		Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo	1 Unit	6,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		15,000,000.00
	Bantuan Peralatan Mesin Jahit Lurus untuk IKM Fashion Kelompok Maju		Nagari Maangiang Koto Alam	5 Unit	25,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
	Bantuan peralatan mesin jahit lurus		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	5 Unit	25,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
	bantuan mesin obras a/n Efni wati		Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kec. Harau	1 Unit	6,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		7,000,000.00
	Bantuan Peralatan Mesin Bordir untuk IKM Fashion		Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Luak dan Kec. Situjuh Limo Nagari	4 Unit	20,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Bantuan Peralatan Usaha Untuk Kelompok Usaha Produksi Makanan Olahan Kelompok HIKMAH		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	5,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		20,000,000.00
	Bantuan Peralatan Mesin Bordir untuk IKM Fashion		Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Luak dan Kec. Situjuh Limo Nagari	2 Unit	12,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		15,000,000.00
	Bantuan Peralatan Mesin Obras untuk IKM Fashion		Kec.LarehSago Halabandan Kec. Situjuh Limo Nagari	4 Unit	24,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		60,000,000.00
	Bantuan Peralatan Mesin Obras untuk IKM Fashion		Kec. Mungka, kec. Guguak	2 Orang	12,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		25,000,000.00
2.00.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya IKM Sehat		21.84%	510,000,000.00				1,325,000,000.00
2.00.07.16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terfasilitasinya IKM dalam pemanfaatan sumber daya		3 produk	60,000,000.00			3 produk	100,000,000.00
	Terfasilitasinya IKM dalam pemanfaatan sumber daya		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 Produk	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		100,000,000.00
2.00.07.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Pelaku usaha IKM yang dilatih		60 orang	400,000,000.00			70 orang	1,015,000,000.00
	Pelatihan Kerajinan dari Limbah Plastik		Tanjung Bungo	5 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan kerajinan dari limbah Plastik		Pauh Sangik	5 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan Produk Furniture dari Bambu		Nagari Taram	5 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan Isdutri Kreatif rumah tangga		Jorong Dalam Nagari	5 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan Pengolahan Bambu dan Kerajinan		Jorong Menara Agung, Jorong	5 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
			Beringin Indah, Jorong Simpang Ganti, Jorong Koto Ramai, Jorong Koto Baru						
	Pelatihan Desain Batik untuk IKM Batik		Jorong Menara Agung, Jorong Beringin Indah, Jorong Simpang Ganti, Jorong Koto Ramai, Jorong Koto Baru	5 Orang	13,750,000.00		IKU Daerah		30,000,000.00
	Pelatihan Produk Furniture Bambu		Sungai Balantiak	5 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan Produk Furniture Rotan		Sungai Balantiak	5 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	pelatihan pembuatan kerajinan berbahan lokal (kerajinan rajutan)		nagari Kurai	5 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan pembuatan gerabah		Jorong Balai Talang	5 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		30,000,000.00
	Pelatihan Anyaman Rotan dan Bambu		Seluruh Jorong yang ada di kenagarian Solok Bio-Bio	5 Orang	16,500,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00

	Pelatihan Kerajinan dari Limbah Plastik		Suayan	5 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan pemanfaatan sampah plastik		Balai Pertemuan Nagari tanjung Gadang	5 Orang	11,000,000.00		IKU Daerah		50,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang dilatih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20 Orang	55,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		100,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang terpilih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7 Orang	12,250,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang terpilih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10 Orang	33,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang terpilih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10 Orang	33,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang terpilih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10 Orang	22,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		5,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang terpilih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10 Orang	33,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Jumlah Pelaku usaha IKM yang terpilih		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5 Orang	16,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Pelatihan produk furniture dari bamboo		Kec. Bukik Barisan, Kec. Suliki, Kec. Gunung Omeh	5 Orang	16,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
2.00.07.16.05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Terfasilitasinya akses permodalan bagi IKM		15 IKM	25,000,000.00			15 IKM	60,000,000.00
	Terfasilitasinya akses permodalan bagi IKM		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 Orang	20,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan Provinsi dalam rangka fasilitasi akses permodalan bagi IKM		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	5,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		10,000,000.00
2.00.07.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta		15 IKM	25,000,000.00			15 IKM	150,000,000.00
	Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 Orang	10,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan provinsi untuk fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	10,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
	Fasilitasi Mitra Bisnis untuk IKM		Kec. Mungka, kec. Guguk	25 Orang	5,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		50,000,000.00
2.00.07.18.	Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya Pertumbuhan IKM		100%	450,000,000.00				535,000,000.00
2.00.07.18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Jumlah bantuan alat produksi		14 unit	150,000,000.00			14 unit	35,000,000.00
	Bantuan Peralatan Pengereng Kerupuk		Nagari Koto Tengah Simalanggang	1 Unit	30,000,000.00		IKU Daerah		35,000,000.00
	Bantuan alat produksi mesin peras kelapa untuk kelompok minyak kasia		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Unit	15,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
	Bantuan mesin pengering kerupuk untuk IKM pengolah makanan ringan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2 Unit	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
	Bantuan Peralatan Mesin Pengereng Kerupuk		Nagari Pandam Gadang	1 Unit	30,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
	bantuan mesin perah kelapa untuk ukm		Jorong Datar Nagari Koto Tengah	1 Paket	15,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
2.00.07.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Fasilitasi pameran dan kegiatan dekranasda		10 even	300,000,000.00			10 even	500,000,000.00
	Fasilitasi pameran dan kegiatan dekranasda		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5 Even	300,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		500,000,000.00
2.00.07.19.	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya IKM Sehat		21.84%	200,000,000.00				500,000,000.00
2.00.07.19.02	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana di sentra IKM		1 paket	200,000,000.00			1 paket	500,000,000.00
	Tersedianya sarana dan prasarana di sentra IKM		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	200,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		500,000,000.00
2.00.08.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi		27.85%	150,000,000.00				300,000,000.00
2.00.08.15.01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi kapur IX		1 paket	75,000,000.00			1 paket	150,000,000.00

	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi, penguatan SDm dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, dan penyuluhan/pelatihan transmigrasi lokal		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	75,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		150,000,000.00
2.00.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi		1 paket	75,000,000.00			1 paket	150,000,000.00
	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, koordinasi/sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 daerah kab/kota dan identifikasi potensi kawasan		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Paket	75,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		150,000,000.00
Total									3,555,812,564.20
									6,306,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tabel 4.1 berikut ini adalah target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.

Tabel. 4.1
Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan IKU OPD

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		KET
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya saing produk daerah	1.1 Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat (%)	21,83	-	IKU KD
		1.2 Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	100,00	-	IKU KD
2	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	2.1 Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)	29,43	-	IKU OPD
		2.2 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,38	-	IKU OPD

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1 untuk tahun 2021, masing-masing target indikator kinerja yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Persentase IKM sehat sebesar 21,83%

Persentase IKM sehat merupakan IKU Kepala Daerah. Pencapaian indikator kinerja ini sampai tahun 2019 baru mencapai 36,63% (188 IKM) yang tersehatkan, dari yang seharusnya dicapai sebesar 56,14% (296 IKM). Sedangkan target kinerja untuk tahun 2020 adalah 22,03% (113 IKM). Kondisi kinerja akhir periode nanti sebanyak 100% (513 IKM) yang sehat. Melihat kondisinya, OPD memang harus bekerja extra untuk mencapai ketertinggalan pencapaian target indikator IKM sehat.

2. Persentase pertumbuhan IKM sebesar 100%

Persentase pertumbuhan IKM merupakan IKU Kepala Daerah. Pencapaian indikator kinerja ini sampai tahun 2019 telah mencapai 159,61% atau 166 IKM yang tumbuh, dari target yang ditetapkan sebesar 49,04% atau 51 IKM yang tumbuh. Target kinerja untuk tahun 2020 adalah 74,04% (77 IKM). Kondisi kinerja akhir periode nanti sebanyak 100% (104 IKM) yang tumbuh.

3. Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja sebesar 29,43%

Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja merupakan IKU Kepala OPD. Sampai dengan tahun 2019 Persentase Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja, target 41,14% (552 angkatan kerja), telah tercapai 68,03 % (913 angkatan kerja). Target pada tahun 2020 adalah sebesar 29,43% atau 395 angkatan kerja.

4. Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja sebesar 26,38%

Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja merupakan IKU Kepala OPD. Sampai dengan tahun 2019 persentase peningkatan penempatan tenaga kerja telah mencapai 48,87% (1482 tenaga kerja) dari target 48,89 % (1483 tenaga kerja). Target pada tahun 2020 adalah sebesar 24,73% (750 tenaga kerja).

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.90 Tahun 2019) pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2021.

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Dan Kegiatan Tahun 2021 (Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006)

No	Bidang Urusan	Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2021		Tahun 2022	Ket.
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program dan kegiatan pada setiap OPD	5	1.165.312.564,20	1.775.000.000,00	24	1.165.312.564,20	1.775.000.000,00	
2	Bidang Urusan Tenaga Kerja	3	680.500.000,00	1.284.000.000,00	6	680.500.000,00	1.284.000.000,00	
3	Bidang Urusan Industri	4	1.560.000.000,00	2.947.000.000,00	10	1.560.000.000,00	2.947.000.000,00	
4	Bidang Urusan Transmigrasi	1	150.000.000,00	300.000.000,00	2	150.000.000,00	300.000.000,00	
Total		13	3.555.812.564,20	6.306.000.000,00	42	3.555.812.564,20	6.306.000.000,00	

Tabel 4.3
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program,
Dan Kegiatan Tahun 2021 (Berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019)

No	Bidang Urusan	Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2021		Tahun 2022	Ket.
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program dan Kegiatan pada setiap OPD	1	4.143.047.867,00	4.764.505.047,00	4	4.143.047.867,00	4.764.505.047,00	
2	Bidang Urusan Tenaga Kerja	3	730.000.000,00	839.500.000,00	6	730.000.000,00	839.500.000,00	
3	Bidang Urusan Industri	3	1.560.000.000,00	1.794.000.000,00	3	1.560.000.000,00	1.794.000.000,00	
4	Bidang Urusan Transmigrasi	1	150.000.000,00	172.500.000,00	1	150.000.000,00	172.500.000,00	
Total		8	6.583.047.867,00	7.570.505.047,00	14	6.583.047.867,00	7.570.505.047,00	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditingkat OPD.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja tahun 2021. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

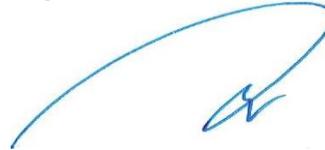
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal Juli 2020

**Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,**



**AFRIZAL, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720817 199202 1 001**

